

Determinan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019

Cahya wahyuningtyas¹, Tari Widati², Dalili Batrisyia³, Muhammad Syafry Firman⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

¹cahyawahyuningtyas2@gmail.com, ²tariwidati17@gmail.com

³dalilibatrisyia219@gmail.com, ⁴syafryfirman02@gmail.com

Abstract

This study aims to show the effect of Regional Original Income, Revenue Sharing Funds, and Total Population on Regional Expenditures for the Province of South Sumatra for the 2015-2016 period. The population of this study were eight districts/cities of South Sumatra. The quantitative analysis technique used in this research is panel data regression analysis. The technique of determining the sample uses the purpose sampling method. The results showed that partially and simultaneously local revenue had a positive and significant effect on regional spending. Furthermore, profit-sharing funds have a positive effect on regional spending. Meanwhile, the total population partially and simultaneously has a significant positive effect on regional spending. This research has implications, especially for the government of South Sumatra Province to improve the quality of the economy, human resources or natural resources to increase APBN revenues. The increase in income will increase the development of infrastructure and public facilities in the Province of South Sumatra.

Keywords: *Regional Original Income, Total Population, Regional Expenditures*

PENDAHULUAN

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa belanja merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah atau negara yang digunakan untuk mengurangi nominal kekayaan bersih (Zamzami et al., 2018). Belanja Daerah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan serta menjadi wewenang provinsi Kab dan Kota serta dapat dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah serta ketetapan undang-undang (Afriawati, 2012). Alokasi Belanja Daerah berdasarkan pada keperluan daerah terhadap sarana dan prasarana. Hal tersebut dilaksanakan demi kelancaran terlaksananya wewenang pemerintah atau sarana publik (Yulina et al., 2017). Terapannya pada keseharian aktivitas, fasilitas publik yang digunakan telah dirancang oleh pemerintah sebagai sarana agar dapat memudahkan berbagai aktivitas masyarakat. Umumnya sarana publik dikenal oleh masyarakat dengan istilah fasilitas umum dan fasilitas sosial (Susanto, 2016). Untuk pembiayaan fasilitas publik maka pemerintah daerah menggunakan APBD untuk perencanaan finansialnya. Oleh sebab itu, Belanja Daerah perlu diperhatikan agar pelayanan publik dapat optimal.

Banyaknya pemanfaatan APBD untuk belanja meningkatkan pelayanan dan pembiayaan fasilitas publik harus diimbangi pula dengan penerimaan yang tinggi, sehingga suatu daerah diharapkan mampu menggali berbagai sumber keuangan guna terpenuhinya kebutuhan akan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan suatu daerah menggunakan berbagai pemasukan baik itu melalui sumber daya yang dikelola di daerah tersebut atau sering

disebut dengan Pendapatan Asli Daerah ataupun sejumlah dana yang diberikan dari atasan kepada suatu daerah sering disebut dengan Dana Perimbangan yang salah satunya yaitu

Dana Bagi Hasil (Fahmi & Hairani, 2019). Selain itu rasio belanja pada suatu daerah juga dipengaruhi oleh tingkat penduduk. Sehingga dengan ini suatu daerah dipacu untuk lebih meningkatkan berbagai pemasukan guna memenuhi kebutuhan belanjanya. Hal ini terbukti pada tahun 2015, belanja daerah hanya sebesar Rp 1.037.584.453,77 dan mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2019 sebesar Rp 9.618.079.513,84. Berdasarkan fenomena peningkatan Belanja Daerah tersebut, maka harus dikendalikan agar tidak terjadi pembengkakan akan Belanja Daerah yang akan berakibat buruk pada meningkatnya utang daerah. Salah satu cara pengendalian akan Belanja Daerah yaitu dengan diimbangi adanya pemasukan daerah baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun sumber keuangan lainnya.

Salah satu sumber pemasukan daerah yang berasal dari suatu daerah asli itu sendiri sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki kaitan erat dengan Belanja Daerah. Agar dapat menyelenggarakan Belanja Daerah maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan mengembangkan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membiayai seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahannya menggunakan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Maka dari itu Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu hal terpenting bagi suatu wilayah (Subowo & Endar, 2010). Dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka pengeluaran rutin juga dapat terwujud disertai pula dengan peningkatan belanja modal. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka akan berdampak terhadap pemerintah daerah pada aspek distribusi penganggaran belanja modal (RM & Heni, 2015).

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, selaku pemerintah daerah harus mampu mendanai berbagai pengeluaran daerah agar tidak menunda urusan perekonomian daerah yang bersangkutan (Simanjuntak et al., 2013). Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan yang diperoleh dari kekayaan yang dikelola daerah yang sudah dibedakan, dan lainnya Pendapatan Asli Daerah yang valid. Pendapatan oleh suatu daerah dapat dipakai serta dimanfaatkan untuk mendanai perencanaan pengeluaran yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Oleh karena itu dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka akan menambah dana serta pemasukan daerah itu sendiri. Tidak hanya itu, suatu daerah juga akan mempunyai tingkat kemandirian yang semakin tinggi, sehingga dengan lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada UU No. 33/2014 Pendapatan Asli Daerah bermaksud untuk memberikan tugas pada pemerintah daerah dalam membiayai perwujudan kegiatan daerah menggunakan kemampuan daerah sebagai bentuk dari sistem pemerintah daerah yang banyak mewariskan otoritas pada pemerintah daerah (Permatasari & Titik, 2016). Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Meianto et al. (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian itu selaras dengan Fahmi & Hairani (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal hasil yang sama juga dilakukan oleh Afrizawati (2012). Tetapi Amalia et al. (2015) mengungkapkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi tingkat Belanja Daerah.

Selanjutnya Belanja Daerah dipengaruhi variabel Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan yang erat kaitannya dengan Belanja Daerah. Menurut Wulandari (2014) Dana Bagi Hasil adalah sumber penghasilan yang tersembunyi dan menjadi modal pemerintah daerah agar memperoleh dana pembangunan serta mencukupi belanja daerah yang tidak berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil berasal dari perolehan pajak dan sumber daya alam. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil maka, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi yang berasal dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil yang tinggi maka alokasi belanja suatu daerah akan semakin banyak pula. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bertujuan untuk membiayai keperluan daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan kebutuhan suatu daerah dan berasal dari APBN. Untuk meningkatkan keperluan akan Belanja Daerah sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih memadai maka pemerintah daerah dapat memaksimalkan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil (Arin et al., 2019).

Dana Bagi Hasil juga salah satu sumber penghasilan daerah yang berpotensi dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan sejumlah dana pembangunan untuk mencukupi belanja daerahnya (Widiasih & Gayatri, 2017). Periansya et al. (2020) dalam penelitiannya memperoleh hasil dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kab/Kota di Sumatera Selatan. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian lain yaitu Yulina et al. (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Lain halnya pada penelitian Dewi et al. (2017), bahwa Dana Bagi Hasil tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja suatu daerah

Jumlah Penduduk erat kaitannya dengan Belanja Daerah. Penduduk merupakan sekelompok manusia yang mendiami sebagian permukaan bumi atau suatu wilayah. Menurut Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 pengertian mengenai "penduduk" yang dimaksud dalam Peraturan adalah hanya penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai izin resmi tinggal di negara Indonesia. Jumlah Penduduk pada suatu daerah dapat disebut sebagai aset penting sepanjang penduduk tersebut mempunyai kualitas SDM yang baik dari segi keterampilan maupun lainnya serta dapat berkontribusi dalam peningkatan produksi nasional. Meningkatnya Belanja Daerah juga dipengaruhi karena Jumlah Penduduk dalam suatu Provinsi. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan anggaran belanja negara juga akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak Jumlah Penduduk akan diiringi pula dengan pemenuhan fasilitas publik ataupun pengeluaran lain untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran daerah dilihat dari skalanya terhadap Jumlah Penduduk menunjukkan kecenderungan Belanja Daerah seperti penggunaan dana untuk membiayai peningkatan ekonomi misalnya Belanja Daerah (Sari & Nurul, 2018). Oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dengan baik agar tidak menjadi sebuah beban bagi daerah. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Jumlah Penduduk kurang lebih 8.052.315 juta jiwa pada tahun 2015 dan mempunyai 18 Kabupaten/Kota. Sari & Nurul (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian lain yang memperkuat penelitian tersebut adalah Mooy & Yuliasuti (2019) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap

Belanja Daerah. Sedangkan penelitian dari Devita et al. (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa Belanja Daerah tidak dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*, dimana komponen yang sama pada *cross section* dapat dihitung pada saat yang tidak sama (Jaya & Neneng, 2009). Pada riset ini data panel berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), data tersebut berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan data Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu 2015-2019. BPS (Badan Pusat Statistik) digunakan sebagai sumber perolehan data dalam riset ini yang berupa jumlah penduduk di provinsi sumatera selatan Dan BPK (Badan pemeriksa keuangan) yang berisikan mengenai realisasi anggaran. Keseluruhan populasi yang digunakan dalam riset ini yaitu Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan dengan berjumlah 10 Kabupaten dan Kota yang diperoleh melalui BPS (Badan Pusat Statistik).

Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini. Pengambilan sampel menggunakan teknik ini didasarkan pada pertimbangan peneliti dan selaras dengan maksud dari penelitian. Wilayah yang digunakan menjadi sampel dalam penelitian ini wajib memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria tersebut yaitu daerah yang harus memiliki laporan keuangan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan data Belanja Daerah yang lengkap sebanyak 10 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu penelitian yang digunakan (tahun 2015-2019). Penggunaan sampel terdiri dari 6 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun yang dimulai dari 2015-2019. 6 kabupaten tersebut yaitu; Kab. Banyuasin, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Pali, dan Kab. Empat Lawang. Sedangkan penggunaan 4 kota meliputi; Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih.

Keseluruhan data yang digunakan yaitu 50 data dari 10 Kab/Kota Sumatera Selatan selama 5 tahun. Teknik analisis data kuantitatif dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel. Berdasarkan data tersebut kemudian dilaksanakan analisa mengenai pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui tingkat signifikan antara variabel maka taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 5% atau 0,05. Menurut hasil analisis yang dilaksanakan, dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh signifikan antara variabel apabila nilai probabilitas > 0,05. Namun, jika hasil pengujian menunjukkan perolehan probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel yang diuji. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan aplikasi eviews. Uji data panel ini meliputi; uji statistik deskriptif, uji stasioneritas, uji linear berganda, uji statistik dan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Uji Statistic Deskriptif****Tabel 1. Uji statistik deskriptif**

Sample: 2015 - 2019

	BD	PAD	DBH	JP
Mean	1.31E+12	1.84E+11	2.87E+11	511691.5
Median	1.04E+12	9.76E+10	1.80E+11	321850.0
Maximum	3.97E+12	1.09E+12	1.21E+12	1674243.
Minimum	1.63E+10	3.60E+09	9.13E+10	133862.0
Std. Dev.	8.42E+11	2.62E+11	2.68E+11	440583.5
Skewness	1.269241	2.576019	1.880566	1.518125
Kurtosis	4.428385	8.409726	5.573594	4.472342
Jarque-Bera	17.67536	116.2680	43.26980	23.72209
Probability	0.000145	0.000000	0.000000	0.000007
Sum	6.57E+13	9.22E+12	1.44E+13	25584574
Sum Sq. Dev.	3.47E+25	3.36E+24	3.52E+24	9.51E+12
Observations	50	50	50	50

Sumber: Data diolah (2021)

Uji awal untuk melakukan screening data disebut juga dengan uji statistik. Uji statistik deskriptif berhubungan dengan bagaimana cara pengumpulan dan penyajian sebuah data sehingga dapat dipahami (Nasution, 2017). Merujuk pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa variabel PAD (X1) nilai rata-ratanya sebesar Rp 184.338.046.374,45 sedangkan untuk nilai standar deviasinya sebesar Rp 261.997.211.923,68. Nilai maksimum dan minimumnya yaitu sebesar Rp 1.091.704.605.854,90 dan Rp 3.600.344.354,05. Variabel DBH (X2) nilai rata-ratanya sebesar Rp 287.490.412.491,12, sedangkan untuk nilai standar deviasinya sebesar Rp 267.991.655.738,17. Nilai maksimum dan minimumnya sebesar Rp 1.212.139.165.136,00 dan Rp 91.300.772.439,00. Variabel jumlah penduduk (X3) memiliki rata-rata 511691.5, dengan nilai standar deviasi yaitu 440583.5. Nilai maksimal dan nilai minimumnya yaitu 1674243 dan 133862.0. Variabel belanja daerah (Y) memiliki rata-rata Rp 1.314.533.051.813,99, dengan nilai standar deviasi yaitu Rp 842.024.700.957,46. Sedangkan nilai maksimumnya yaitu Rp 3.965.007.263.481,72 dan nilai minumumnya sebesar Rp 16.315.016.923,41.

Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui serta membuktikan data perolehan regresi tidak terdapat *unit root* atau stasioner dan memperlihatkan tidak ada regresi lancung antara variabel bebas maupun terikat (Balqis & Suriani, 2004). Penelitian ini menggunakan uji *unit root Levin, Lin & Chu* pada 1^{st} *difference* dalam pengujian stasioneritas.

Tabel. 2 Uji Stasioneritas

No.	Variabel	Prob.*	Keterangan
1.	Belanja Daerah (Y)	0.0269	Data Stasioner

2.	Pendapatan Asli Daerah (X1)	0.0000	Data Stasioner
3.	Dana Bagi Hasil (X2)	0.0000	Data Stasioner
4.	Jumlah Penduduk (X3)	0.0000	Data Stasioner

Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 2, memperlihatkan bahwa nilai dari pengujian stasioneritas variabel belanja daerah (Y) terdapat nilai probabilitas adalah 0.0269 dimana perolehan tersebut lebih tinggi dari nilai alpha yaitu 0,05 ($0.0269 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya belanja daerah memperoleh hasil yang stasioner atau signifikan. Selanjutnya variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah 0.0000 dimana perolehan itu lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05 ($0.0000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya pendapatan asli daerah memperoleh hasil yang stasioner atau dapat dikatakan signifikan. Begitu pula dengan variabel Dana Bagi Hasil (X2) menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05 ($0.0000 < 0,05$), oleh karena itu H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya dana bagi hasil memperoleh hasil yang stasioner atau dapat dikatakan signifikan. Untuk variabel Jumlah Penduduk (X3) perolehan nilai probabilitas adalah 0.0000 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05 ($0.0000 < 0,05$), oleh karena itu H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya jumlah penduduk memperoleh hasil yang stasioner atau dapat dikatakan signifikan.

Uji Model

Tabel 3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.998667	(9,37)	0.4582
Cross-section Chi-square	10.873136	9	0.2845

Sumber: Data diolah (2021)

Uji chow dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara common effect model (CEM) maupun fixed effect model (FEM) (Lestari & Yudi, 2017). Penetapan ketentuan dalam uji chow dilihat dari perolehan nominal *cross-section chi square* apabila $> \alpha=0,05$ maka CEM model yang terpilih. Namun apabila *cross-section chi square* $< \alpha=0,05$ maka FEM model yang dipilih. Berdasarkan tabel 3 di atas didapat nominal dari *cross-section chi square* = 0.2845 $> \alpha=0,05$. Oleh karena itu *common effect* (CEM) yang dipilih.

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.915137	3	0.4049

Sumber: Data diolah (2021)

Uji hausman digunakan untuk mengetahui satu model terbaik diantara kedua model *Fixed Effect* (FEM) dengan *Random Effect* (REM). Penentuan keputusan ini dilihat pada nilai cross-section random. Apabila nilai cross-section random $< 0,05$ maka model Fixed Effect menjadi regresi terpilih. Namun ketika nilai yang diperoleh $> 0,05$ maka Random effect model menjadi regresi yang terpilih. Merujuk pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nominal dari cross-section random = $0,4049 > 0,05$ maka, model terpilih yaitu Random Effect (REM).

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.633502 (0.4261)	0.791471 (0.3737)	1.424973 (0.2326)
Honda	-0.795928 --	0.889647 (0.1868)	0.066269 (0.4736)
King-Wu	-0.795928 --	0.889647 (0.1868)	0.298729 (0.3826)
Standardized Honda	-0.020392 --	1.224129 (0.1105)	-2.536452 --
Standardized King-Wu	-0.020392 --	1.224129 (0.1105)	-2.112110 --
Gourierioux, et al.*	--	--	0.791471 (≥ 0.10)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Sumber: Data diolah (2021)

Selanjutnya dilakukan uji *lagrange multiplier*. Uji ini dilakukan untuk menetapkan satu model terbaik diantara kedua model yaitu Random Effect atau Common Effect (Azis, 2020). Penentuan keputusan dalam uji *lagrange multiplier* (LM) dapat dilihat apabila nilai *Breusch Pagan* $> \alpha=0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect* dan sebaliknya jika nilai *Breusch Pagan* $< \alpha=0,05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect*. Berdasarkan (tabel 4) diatas diperoleh nilai dari *Breusch Pagan* yaitu $0.4261 > 0.05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect* (CEM).

Uji Hipotesis

Tabel 6. Uji Hipotesis

Sample: 1 50

Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.99E+11	9.95E+10	4.006910	0.0002
PAD	1.411841	0.408375	3.457215	0.0012
DBH	0.703269	0.187482	3.751129	0.0005
JP	885885.4	242599.2	3.651642	0.0007
R-squared	0.836926	Mean dependent var	1.31E+12	
Adjusted R-squared	0.826291	S.D. dependent var	8.42E+11	
S.E. of regression	3.51E+11	Akaike info criterion	56.08227	
Sum squared resid	5.67E+24	Schwarz criterion	56.23523	
Log likelihood	-1398.057	Hannan-Quinn criter.	56.14052	
F-statistic	78.69366	Durbin-Watson stat	2.033632	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah (2021)

Uji R Square

Uji R square dilakukan sebagai penilai terhadap seberapa mampu suatu model dapat menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat (Febriyanti, 2017). Dari tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai R-square 0.836926 membuktikan bahwasanya tingkat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) terhadap Belanja Daerah sebesar 83,69%. Artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah sebesar 83,69% sedangkan sisanya 16,31% dengan perhitungan (100%-83,69%) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat di dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menguji seluruh variabel bebas secara bersama yang kaitannya dengan variabel terikat. Perolehan hasil uji F dapat diketahui pada tabel 3 di atas. Nilai prob. F (Statistic) sebesar 0.000000 > dari tingkat signifikan yaitu 0,05 (0.000000 < 0.05) oleh karena itu dapat dikatakan bahwa secara simultan, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berdampak signifikan terhadap Belanja Daerah.

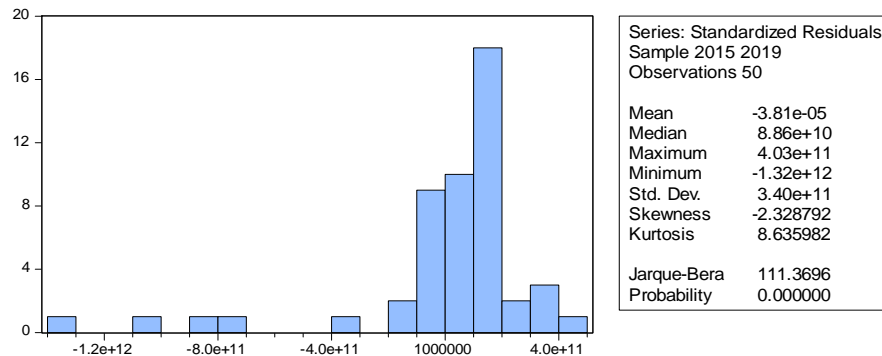
Uji Statistik T

Uji T statistic dilakukan untuk melihat kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan kemampuan terhadap variabel terikat (Khurun In & Nur, 2020). Dalam hal ini dapat diketahui dengan membandingkan nominal probabilitas dari setiap variabel independen dengan alpha yaitu 0,05. Melihat pada tabel 3 diatas nilai prob. t hitung dari variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0.0012 < 0,05 oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selanjutnya, untuk variabel X2 (Dana Bagi Hasil) sebesar 0.0005 < 0,05 artinya Dana Bagi Hasil memiliki

pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selanjutnya untuk variabel X3 (Jumlah Penduduk) sebesar $0.0007 < 0,05$. Diartikan bahwa Jumlah Penduduk berdampak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 1. Uji Normalitas

Untuk melihat suatu data dapat terdistribusi secara normal atau sebaliknya maka dilakukan sebuah uji yaitu normalitas (D. Handayani & Elva, 2012). Hal tersebut dapat dilihat nilai dari *Jarque-Bera Test*. keputusan bahwa data tersebar normal atau tidaknya secara spesifik dapat diketahui dengan mengkomparasikan nilai dari probabilitas *Jarque-Bera* dengan nilai alpha yaitu 0,05. Apabila nilai dari probabilitas *Jarque-Bera* > 0,05 maka ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi normal. Namun jika nilai dari probabilitas *Jarque-Bera* < 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak terdistribusi normal. Pada gambar 1. diatas diperoleh hasil dari probabilitas *Jarque-Bera* yaitu $0.000 < 0,05$ artinya data tersebut tidak cukup bukti untuk memperlihatkan bahwa residual terdistribusi normal. Atau dapat dinyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.91E+21	4.021387	NA
PAD	0.166770	6.855083	4.554453
DBH	0.035150	2.183760	1.004352
JP	5.89E+10	10.80121	4.545266

Sumber: Data diolah (2021)

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah suatu data terdapat gejala multikolinearitas atau tidak (Handoko & Pratama, 2019). Model regresi yang bagus seharusnya antara variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas. Dalam melihat ada atau

tidaknya gejala multikolinearitas maka dapat diketahui pada nilai *variance Inflation Factor* (VIF) yang dibandingkan dengan nilai *tolerance* 0,10. Jika nilai VIF > 10 dikatakan bahwa mengalami gejala multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10 maka tidak ada gejala multikolinearitas. Dari tabel 7 diatas nilai dari *centred variance Inflation Factor* (VIF) X1 sebesar 4.554453, X2 sebesar 1.004352, dan X3 yaitu 4.545266. Dengan demikian menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF < 10. Dikatakan bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.214959	Prob. F(3,46)	0.3149
Obs*R-squared	3.670948	Prob. Chi-Square(3)	0.2993
Scaled explained SS	5.809249	Prob. Chi-Square(3)	0.1213

Sumber: Data diolah (2021)

Untuk melihat terjadinya perbedaan variasi dari residual antar pandangan dalam model maka dilakukan uji heteroskedastisitas (Tumiwa et al., 2016). Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode uji glejser. Menurut Fauziah & Dewi (2018) maksud dilakukannya uji glejser yaitu merekomendasikan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen. Terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai Prob. F. Bila nilai Prob. F > 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Namun jika nilai dari Prob. F < 0,05 maka mengalami heteroskedastisitas. Selain itu apabila nilai dari prob. *Chi-Square* > 0.05 maka tidak ada heteroskedastisitas, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 8 diatas dilihat bahwa nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0.2993 > 0,05 dan nilai Prob. F yaitu 0.3149 > 0,05. Artinya tidak ada permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.390850	Prob. F(2,44)	0.6788
Obs*R-squared	0.872789	Prob. Chi-Square(2)	0.6464

Sumber: Data diolah (2021)

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat fenomena autokorelasi diantara periode yang diuji pada model regresi (L. E. Dewi et al., 2015). *Breusch-Godfrey* atau LM digunakan sebagai metode dalam uji autokorelasi pada penelitian ini (*Lagrange Multiplier*) Test. Apabila nilai Prob. F(2,44) > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Prob. F(2,44) < 0,05 maka terjadi autokorelasi. Pada tabel 9 diatas diperoleh hasil dari nilai Prob. F(2,44) sebesar 0,6788 > 0,05 maka tidak mengalami gejala autokorelasi.

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan kaitannya dengan Belanja Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019. Hal tersebut berarti semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tersebut, akan diikuti pula dengan meningkatnya Belanja Daerah begitu pula sebaliknya, menurunnya Pendapatan Asli Daerah juga diikuti menurunnya Belanja Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka membuktikan bahwa suatu daerah dapat mengelola secara efektif sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Sumatera Selatan mempunyai tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang baik maka berpeluang mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang baik pula. Oleh karena itu akan memberikan dampak baik pada peningkatan ekonomi di Sumatera Selatan. Apabila Pendapatan Asli Daerah naik maka, dana yang akan digunakan untuk alokasi pembangunan juga berpeluang meningkat. Dalam hal ini maka semakin tinggi tingkat Pendapatan Asli Daerah yang didapat, maka akan diimbangi dengan pengeluaran yang bergerak meningkat. Lembaga pemerintah dalam hal ini harus memberikan gagasan untuk lebih menelusuri kemampuan daerah serta memajukan peningkatan ekonomi daerah Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meianto et al. (2014), Fahmi & Hairani (2019), Afrizawati (2012), Purpitasari & Kurnia (2015), dan Ernayani (2017) yang dalam risetnya menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD). Namun berbeda pada analisis oleh Amalia et al. (2015) dalam risetnya mengungkapkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi tingkat Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah

Merujuk dari data hasil penelitian tersebut bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Belanja Daerah di Kab/kota Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2019. Semakin tinggi jumlah Dana Bagi Hasil maka juga akan meningkatkan Belanja Daerah begitu pula sebaliknya, penurunan Dana Bagi Hasil maka akan diikuti dengan menurunnya jumlah Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan diperoleh dari sumber daya alam atau pendapatan yang berasal dari pajak, kemudian diberikan ke daerah berdasarkan pada kemampuan suatu daerah tersebut. terdapatnya Dana Bagi Hasil maka pemerintah daerah dapat menjalankan pemerataan desentralisasi dan mencukupi kebutuhan daerah secara maksimal.

Dana Bagi Hasil yang merupakan pendapatan asli dari daerah menghendaki daerah untuk mensejahterakan rakyat dalam bentuk kekayaan daerah yang dikelola secara proporsional serta professional dan pembangunan infrastruktur secara berkala salah satunya dengan mengalokasikan anggaran ke sektor Belanja Daerah. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pembangunan sebagai fasilitator karena pemerintah mengetahui sasaran tujuan yang akan dicapai. Belanja Daerah merupakan salah satu perwujudan yang hendak dicapai dalam pembangunan sub sektor perekonomian dalam suatu daerah dengan maksud desentralisasi. Perwujudan dari hal ini dimana pengeluaran ataupun pemasukan dapat diperoleh dari Dana Bagi Hasil dan didistribusikan dalam porsi yang sesuai.

Penelitian ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Periansya et al. (2020), Yulina et al. (2017), Sasana (2010) dan Handayani et al. (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Lain halnya pada penelitian Dewi et al. (2017), menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja suatu daerah.

Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah

Setelah dilakukan pengujian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya jumlah Belanja Daerah. Oleh sebab itu tingginya tingkat penduduk di Provinsi Sumatera Selatan maka akan diimbangi dengan tingginya jumlah pengeluaran dalam bentuk Belanja Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang jauh lebih baik. Penelitian yang dilakukan pada daerah Sumatera Selatan ini dalam kurun waktu 2015-2016 menunjukkan bahwasanya tingkat Jumlah Penduduk tertinggi terdapat di Kota Palembang. Semakin tinggi jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan, maka berdampak pula dengan semakin meningkatnya pengeluaran akan Belanja Daerah. Hal tersebut karena Jumlah Penduduk meningkat akan berhubungan dengan kemampuan bertambahnya infrastruktur untuk mewujudkan keinginan tersebut serta meningkatnya jumlah sarana pemuas kebutuhan. Tingginya Jumlah Penduduk digunakan sebagai acuan dalam membangun tatanan daerah agar tidak hanya maju namun juga berkembang. Besarnya Jumlah Penduduk akan berdampak bagi pemerintah daerah, karena menurut pandangan pemerintah hal tersebut dipandang sebagai salah satu aset dalam meningkatkan mutu serta keahlian atau keterampilannya sehingga mempunyai produktivitas tinggi. Namun peningkatan ini pula harus dikendalikan agar masalah baru tidak terjadi, salah satu diantaranya yaitu beban serta biaya dalam jalannya pembangunan.

Riset ini didukung oleh penelitian dahulu yang dilakukan oleh Sari & Ningsih (2018), Sanusi & Muhammad (2018) dan Mooy & Yuliasuti (2019) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Namun penelitian tersebut berbeda dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Devita et al. (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa Belanja Daerah tidak dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada tujuan dilakukannya riset ini yaitu untuk menguji terdapat pengaruh atau tidaknya Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan variabel yang sudah disebutkan serta hasil analisa sebelumnya maka diperoleh suatu inti pada penelitian ini. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada sepuluh kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Hasil pengujian yang telah dilakukan selanjutnya mengindikasikan bahwa Dana bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada sepuluh Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Pengujian terakhir yang telah dilakukan yaitu pada aspek Jumlah Penduduk, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pula terhadap Belanja Daerah dilihat pada sepuluh Kab/Kota di Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengujian di atas ditarik kesimpulan bahwa secara simultan, tiga variabel bebas

berpengaruh secara signifikan terhadap satu variabel terikat pada seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2015 – 2019.

REFERENSI

- Afrizawati. (2012). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*, 2, 1.
- Amalia, W. R., Wahyudin, N., & M, N. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 – 2013). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.171>
- Arina, M. M., Rosalina, A. M. K., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 26–35. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019>
- Azis, M. I. (2020). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 122–129.
- Balqis, R., & Suriani. (2004). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Acute Pain*, 6(2), 1. [https://doi.org/10.1016/s1366-0071\(04\)00058-0](https://doi.org/10.1016/s1366-0071(04)00058-0)
- Devita, A., Arman, D., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2, 63–70. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/2255/pdf>
- Dewi, K. R., Putu, K., & Ni, L. G. N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 7(1), 180–188.
- Dewi, L. E., Nyoman, T. H., & Luh, G. E. S. (2015). Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). *E-Journal S1 Ak.*, 3(1), 466–469.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Fahmi, M., & Hairani. (2019). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 16(1), 40–50. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i1.3407>
- Fauziah, D. N., & Dewi, A. N. W. (2018). Pengukuran Kualitas Layanan Bukalapak.com Terhadap Kepuasan Konsumen dengan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*, 3(2), 173–180.
- Febriyanti, I. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(12), 1–17.
- Handayani, D., & Elva, N. (2012). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap

- Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.541>
- Handayani, S. P., Syukriy, A., & Heru, F. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan Di Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2), 45–50.
- Handoko, B., & Pratama, A. (2019). Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10(1), 1–14.
- Jaya, I. G. N. M., & Neneng, S. (2009). *Kajian analisis regresi dengan data panel*. 51–58.
- Khurun In, A. W., & Nur, F. A. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(2), 139–184. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4116>
- Lestari, A., & Yudi, S. (2017). Analisis Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 2(1), 1–11.
- Meianto, E., Betri, & Wenny, C. D. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal STIE Multi Data Palembang*, 1–13.
- Mooy, P. C. A., & Yuliasuti, R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 49–55. <https://doi.org/10.1021/ja01626a006>
- Periansya, Ardiyan, N., Susi, A., Fadilia, N., Gian, P., & Melani, D. S. (2020). Analisis Atas Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(33), 158–168.
- Permatasari, I., & Titik, M. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–17.
- Purpitasari, P., & Kurnia. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(11), 26–32. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i4.8445>
- RM, R. D. C., & Heni, M. (2015). Hubungan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Dengan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.17509/jpak.v3i1.15433>
- Sanusi, A., & Muhammad, Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 50–56.
- Sari, P., & Nurul, H. N. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAU, dan DAK Sebagai Variabel Intervening. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), 99–112. <https://doi.org/10.29259/ja.v12i2.9311>
- Sasana, H. (2010). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. *Eko-*

Regional, 5(2), 60–66.

- Simanjuntak, L. L. F., Ahmad, S., Ika, S. F., & Hasni, Y. (2013). Analysis of Flypaper Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income To Regional Expenditure. *The 14th FourA Annual Conference 2013, Penang, Malaysia*, 1–29.
- Subowo, & Endar, R. W. (2010). Hubungan Antara Pad Dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 1–1. <https://doi.org/10.15294/jda.v2i2.1930>
- Susanto, T. P. (2016). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FASILITAS PUBLIK (Studi Kasus Penggunaan Trotoar di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan Kabupaten Jember)*.
- Tumiwa, M., Rosalina, A. M. K., & Niode, A. O. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Bitung Tahun 2003-2015. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 764–770.
- Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2143–2171. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25832>
- Wulandari, Y. (2014). Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia. *ARTIKEL*.
- Yulina, B., Kartika, R. S., Rita, M., Husnul, H. S. D., & Khairunnisa, A. S. (2017). Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(2), 89–96.
- Zamzami, F., Mukhlis, A., & Pramesti, E. (2018). *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (p. 206). Universitas Gadjah Mada Press. https://books.google.co.id/books?id=fcdVDwAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=Audit+Keuangan+Sektor+Publik+Untuk+Laporan+Keuangan+Pemerintah+Daerah&hl=id&source=gbs_navlinks_s